

PROSIDING



Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) 2010
Universitas Budi Luhur

**"Pengembangan Budaya Kreatif
Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan"**



5 Agustus 2010

ISSN: 2087-0930.

mandiri





PROSIDING

SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SENMI) 2010

UNIVERSITAS BUDI LUHUR JAKARTA

ISSN: 2087-0930

PENGEMBANGAN BUDAYA KREATIF DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

5 AGUSTUS 2010

UNIVERSITAS & AKADEMI SEKRETARI BUDI LUHUR
Jl. Cileduk Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260
Telepon (021) 5853753 ext. 253/257/216

Email : senmi@budiluhur.ac.id
Website <http://senmi.budiluhur.ac.id>

ISSN 2087-0930



9 772087 093077

DAFTAR ISI

	HAL
1. Daftar Isi -----	i
2. Sambutan Rektor Universitas Budi Luhur -----	ii
3. Kata Pengantar Ketua Panitia -----	iii
4. Susunan Panitia -----	iv
5. Tim Reviewer SENMI 2010 -----	vi
6. Jadwal Acara -----	vii
7. Daftar Isi Prosiding -----	viii
8. Panel ICT dan Elektronika -----	1
9. Panel Ilmu Ekonomi -----	66
10. Panel Sosial/Humaniora -----	94
11. Panel Ilmu Arsitektur -----	127
12. Daftar Diskusi Panel -----	143



JADWAL ACARA
SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SENMI) 2010
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA, 5 AGUSTUS 2010

WAKTU		ACARA	LOKASI
08.30	09.30	Registrasi Peserta	Unit 6 Lt. Dasar
		Coffee Morning	Ruang 6.4.5 & 3.4.3
09.35	09.40	Laporan Ketua Panitia	R. Teater (Unit 6)
09.40	09.50	Pembukaan oleh Rektor Universitas Budi Luhur, Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara	
09.50	10.20	Keynote speaker I: Menteri Negara Koperasi & Usaha Kecil Menengah (Meneg KUKM) Dr. Sjarifuddin Hasan	
10.20	10.50	Keynote speaker II: Pakar Ekonomi Lingkungan, Drs. M. Suparmoko, MA, Ph.D	
11.05	11.20	Briefing diskusi panel	
11.20	12.45	ISOMA	Ruang 6.4.5 & 3.4.3
12.45	13.00	Registrasi ulang diskusi panel	Gedung Suhanah Unit 7 Lt. 2, Lt.3 & Lt. 5
13.00	17.00	Diskusi panel*	
17.00	17.30	Acara penutupan	

*) harap peserta melihat jadwal khusus diskusi panel per grup/topik makalah

Catatan:

- Alokasi waktu presentasi adalah 20 menit per judul (sudah termasuk pertukaran antar pemakalah)

Contact Person Panitia: Desy (HP 0857 1055 2900) - Martini (Hp 0812 8976 4300)

**DAFTAR ISI PROSIDING
SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SENMI) 2010
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA, 5 AGUSTUS 2010**

PANEL: ICT & ELEKTRONIKA

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
1	Agung Hadhiatma	TEMU KEMBALI DOKUMEN WAYANG DALAM BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL RUANG VEKTOR	1
2	Albert Gifson, ST, MT	STUDI PEMANFAATAN INTERNET KECAMATAN PADA DAERAH PEDESAAN MELALUI PROGRAM UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION	2
3	Anita Ratnasari	METODE E-LEARNING GUNA MENINGKATKAN KNOWLEDGE SHARING	3
4	Irawan	PEMANTAU SISTEM KENDALI BANJIR JARAK JAUH	4
5	Bagus Tri Prabawa, S.Kom, M.Sc, Muhaemin, S.Kom MM	KAJIAN PENGEMBANGAN SISTEM BASIS DATA INDUSTRI STUDI KASUS: KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)	6
6	Dyah Asrining Wulandari dan Prabowo Pudjo Widodo	STRATEGI IT DISASTER RECOVERY PLAN PADA CORE BANKING SYSTEM DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: STUDI KASUS PADA PT. BANK MEGA TBK	7
7	Eko Warno dan Prabowo Pudjo Widodo	Metode Pemilihan Perangkat Lunak Antivirus berbasis Free : Studi Komparasi Avira Antivir Personal, Avast Free Antivirus, BitDefender Free Edition, AVG Anti-Virus Free Edition, Spyware Terminator, dan	8
8	Indra	MOBILE INFORMATION PADA RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN METODE WIRELESS MESSAGING API (WMA)	9
9	Iwan Rijayana, S.Kom, M.M, M.Kom, Ricky Romanzah	APLIKASI ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK BUDAYA INDONESIA BERBASIS MULTIMEDIA	10
10	Kusuma Hati, S.Kom, MM	PENERAPAN MODEL UTAUT UNTUK MEMAHAMI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SISTEM ABSENSI ONLINE	11
11	Linna Oktaviana Sari, ST, MT	PENGARUH PENGGUNAAN ANTENA BEAMFORMING UNTUK SEKTORISASI PADA KAPASITAS SISTEM MULTICLASS CDMA	12
12	Lucia Sri Istiyowati dan Prabowo Pudjo Widodo	PENILAIAN KEMATANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN KERANGKA KERJA COBIT VER 4.0 KHUSUSNYA DOMAIN PO (PLAN AND ORGANISE) DAN AI (ACQUIRE AND IMPLEMENT) Studi Kasus: Sistem Informasi Akademik di ABFI Institute Perbanas	13

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
13	Mardiana Purwaningsih dan Prabowo Pudjo Widodo	EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.0 UNTUK DOMAIN DELIVER & SUPPORT DAN MONITOR & EVALUATE Studi Kasus: Sistem Informasi Akademik ABFII Perbanas	14
14	Nita Merlina dan Prabowo Pudjo Widodo	KAJIAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTUAL AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) DALAM PENGGUNAAN OPENSOURCE SOFTWARE UNTUK PEMBELAJARAN DESIGN WEB DILINGKUNGAN MAHASISWA: STUDI KASUS KAMPUS BSI KRAMAT / SALEMBA	15
15	Prabowo Pudjo Widodo	PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PERUMUSAN STRATEGI SEKTOR KEHUTANAN	17
16	Prabowo Pudjo Widodo dan Ahmad Sulhi	METODE PEMILIHAN PERANGKAT LUNAK NMS BERBASIS FOSS (FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE) DENGAN PENDEKATAN ANALITICAL HIERARCY PROCESS (AHP) :STUDI KOMPARASI GROUNDWORK, HYPERIC HQ, NAGIOS, OPENNMS, DAN ZENOSS	18
17	Prabowo Pudjo Widodo dan Jesaja HB Waterkamp	STRATEGI PEMILIHAN KESATUAN UNIT IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS STUDI KASUS APLIKASI SAP PADA KELOMPOK KOMPAS GRAMEDIA	19
18	Prabowo Pudjo Widodo dan Shirly Anjar Artha	EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN 15 KERANGKA KERJA COBIT 4.0 STUDI KASUS: SISTEM INFORMASI PT. GREAT EASTERN LIFE INDONESIA	20
19	Prabowo Pudjo Widodo dan Waluyo	ANALISIS EFISIENSI RELATIF KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) DI RS. ISLAM JAKARTA PONDOK KOPI	21
20	Reni Prihastuti	APLIKASI INTERACTIVE VOICE RESPONSE MENGGUNAKAN DTMF SEBAGAI PUSAT LAYANAN INFORMASI AKADEMIK TANPA OPERATOR : Studi Kasus Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Budi Luhur	23
21	Rudi Heriansyah1, S. A. R. Abu-Bakar	NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF INCINERATOR BY MEANS OF INFRARED THERMOGRAPHY	25
22	Safitri Juanita	PERENCANAAN PORTFOLIO APLIKASI MENDATANG BERDASARKAN STRATEGI BISNIS PERGURUAN TINGGI	26
23	SEMUIL TJIHARJADI DAN MARVIN CHANDRA WIJAYA	PERANCANGAN PENGAMANAN GAMBAR DIGITAL MENGGUNAKAN TEKNIK ENKRIPSI BERBASIS BLOCK CIPHER	28
24	Dr. Dana Indra Sensuse, Sofian Lusa,SE.,M.Kom, Mario Iskandar, ST., MTI	KAJIAN PENERAPAN APLIKASI OPEN SOURCE DI PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDEKATAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY STUDI KASUS PENGEMBANG SOFTWARE AKADEMIK SISFOKAMPUS	30

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
25	Spits Warnars	CLASSIFICATION RULE WITH SIMPLE SELECT SQL STATEMENT	31
26	Sulfa Maria dan Prabowo Pudjo Widodo	Kajian Penggunaan Adobe Photoshop Berdasarkan Pendekatan TAM: Studi Kasus Pada SMK Negeri 5 Tangerang	32
27	Tazul Arifin dan Prabowo Pudjo Widodo	KAJIAN EFEKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI PEMANFAATAN INTERNET DALAM PEMBERIAN LAYANAN AKADEMIK: STUDI KASUS PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS TARUMANAGARA	33
28	Titin Fatimah, Kholid	APLIKASI BLUETOOTH FTP PADA HANDPHONE DENGAN SISTEM OPERASI SYMBIAN S60	35
29	Untung Rahardja, Jazi Eko Istiyanto, dan Valent Setiatmi	GLOBAL PASSWORD UNTUK KEMUDAHAN DI DALAM PENGGUNAAN, PENGONTROLAN, DAN KEAMANAN SISTEM	36
30	Vilia Eka Meyana Prabowo Pudjo Widodo	KAJIAN PENERAPAN BUFFER SISTEM ADMINISTRASI SEKOLAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL: STUDI KASUS TIGA SMA NEGERI JAKARTA TIMUR	37
31	I Wayan Degeng	Simpangan Keluaran DT51 Yang Diprogram Dengan Logika Fuzzy Tak-Linear	38
32	Windu Gata dan Grace Gata	PENGGUNAAN OBJEK PUSTAKA (OBJECT LIBRARY) PADA BAHASA PEMROGRAMAN JAVA	39
33	Yumarsono Muhyi, ST, MM	ELETRICAL RAILWAY TRAIN AUTOMATED SCHEDULING MODELING OF PT. KAI	40
34	Achmad Solichin, Ferdiansyah, Wayhu Pramusinto	WEB USAGE MINING: PROSES, APLIKASI DAN PENGGUNAANNYA	41
35	Achmad Solichin, Ferdiansyah, Wahyu Pramusinto	WEB USAGE MINING DENGAN GOOGLE ANALYTICS: STUDI KASUS SITUS ACHMATIM.NET	42
36	Dyah Retno Utari, Wahyu Pramusinto, Wihartini	Penyebaran Informasi Banjir Di Dki Jakarta Melalui Media Web Dengan Dukungan Basis Data	43
37	Eko Polosoro	PENGGUNAAN MIKROKONTROLER DT-AVR LOW COST MICRO SYSTEM DAN DT I/O RELAY BOARD UNTUK MENGENDALIKAN GERAKAN ROBOT MANUAL DIDALAM MELETAKKAN OBJEK PADA POSISI YANG TELAH DITENTUKAN	44
38	Irawan	RANCANGAN SIMULATOR PENCUCI MOBIL OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER AT89C51	45
39	Moedjiono	PEMBERDAYAAN BAHASA MELALUI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENJEMBATANI MASALAH KESENJANGAN DIGITAL	46

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
40	Moedjiono	INTERNET GOVERNANCE TO BRIDGE THE DIGITAL DIVIDE PROBLEM IN INDONESIA	47
41	Marvin Chandra Wijaya, Semuil Tjiharjadi	SISTEM OTOMATISASI PEMELIHARAAN TANAMAN HIDROPONIK	48
42	Suwasti Broto, Norazan Mohd Kassim and Ibrahim Mohd Haniff	THE POLARIZATION CHARACTERISTICS BASED ON THE RIB WAVEGUIDE STRUCTURES USING THE EFFECTIVE INDEX METHOD	49
43	Yan Everhard	PENGGUNAAN DUAL MIKROKONTROLER UNTUK MENGENDALIKAN GERAKAN ROBOT OTOMATIS DIDALAM MELETAKKAN OBJEK PADA POSISI YANG TELAH DITENTUKAN	50
44	M. Anif	Two-Factor Authentication untuk keamanan Transaksi online berbasis SMS, Studi Kasus WebDOSEN Universitas Budi Luhur Jakarta	51
45	Prabowo Pudjo Widodo, Arief Wibowo, Dony Gunawan	Kajian Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Dalam Penggunaan Opensource Software Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	52
46	Siswanto, Welly Sumarsono	SISTEM PENGENDALI KETINGGIAN PERMUKAAN AIR PADA PINTU AIR MANGGARAI MENGGUNAKAN PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE (PPI) 8255 DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN BORLAND DELPHI 7.0	54
47	TW Wisjhnuadji	PERANCANGAN SISTEM PENJEJAKAN KERETA API BERBASIS JARINGAN SELULER DENGAN TEKNOLOGI RFID	55
48	Agung Hernawan,	IMPLEMENTASI PRAKTIKUM ROUTING PADA LINGKUNGAN VIRTUAL	56
49	Radita.Arindya,ST,MT	PENALAAAN KENDALI PID UNTUK PENGENDALI PROSES	57
50	Adri Senen	STUDI PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI DAYA LISTRIK BERDASARKAN PERTUMBUHAN BEBAN BERBASIS BIAYA INVESTASI MINIMUM	58
51	Rizky Tahara Shita, M.Kom	Integrasi Database Terdistribusi Menggunakan Pendekatan Web Services	59
52	Imelda, Nurwati	ANALISA PEMILIHAN METODOLOGI PENGEMBANGAN E-LEARNING DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) STUDI KASUS KELAS KARYAWAN UNIVERSITAS BUDI LUHUR	60

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
53	Nurwati, Yudi Santoso	ANALISIS PEMILIHAN E-LEARNING SYSTEM UNTUK KELAS KARYAWAN DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) : STUDI KASUS FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR	62
54	Muhaemin, S.Kom MM, Djoko Harsono	Desain Aplikasi e-Tourism dengan memanfaatkan Teknologi Web Service	63
55	Dr. H. Welya Roza, M.Pd	LISTRIK TERBARUKAN (RENEWABLE ENERGY) DI DANAU MANINJAU: APLIKASI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN	64
56	Wahyu Pramusinto, Dyah Retno Utari, Wihartini	Model Sistem Penyebaran Informasi Banjir Menggunakan Media Web Studi Kasus Wilayah Dki Jakarta	65

**DAFTAR ISI PROSIDING
SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SENMI) 2010
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA, 5 AGUSTUS 2010**

PANEL: EKONOMI

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
1	Budi Rahardjo	PEMROGRAMAN NON LINIER SYARAT KUHN-TUKER UNTUK PENYELESAIAN OPTIMASI MAKSIMALISASI UTILITAS KONSUMEN DENGAN PEMBATAS ANGGARAN	66
2	Dhani Sulistiyono	A STUDY OF THE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IMPACT OF LOAN AND COLLATERAL POLICY (KUR) FOR SMALL BUSINESS OWNER/MANAGER WITH DIFFERENT CULTURAL BACKGROUND IN INDONESIA	67
3	Evi Gravitiani, Dr, SE, M.Si dan Erni Umami Hasanah, SE, M.Si	VALUASI EKONOMI DAMPAK TIMBAL DARI ASAP BUANGAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA	68
4	Henky Lisan Suwarno	UNIVERSITY BRANDING: STRATEGI PEMASARAN KREATIF DAN KOMPETITIF DALAM UPAYA MENINGKATKAN DAN MEMPERTAHAKAN EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI	69
5	Anita Maharani, Ence Ramli Alrashid	HOW DO YOUNG PEOPLE PERCEIVED AND VALUED CREATIVITY: A STUDY OF FUTURE HUMAN CAPITAL IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION	70
6	Imaninnur, S.P.Sunardiyaningsih	ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP HARGA SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2004 – 2008)	71
7	Mia Laksmiwati	STRATEGI DIFERENSIASI PRODUK BERBASIS BUDAYA INDONESIA DALAM RANGKA MENGHADAPI PERSAINGAN DI PASAR GLOBAL	72
8	Dra. S. Mudjijah, SE, MM, Reni Hariyani, SE, M.Akt	PENERAPAN TRIPLE HELIX DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF PADA SUBSEKTOR RISET & PENGEMBANGAN	73
9	Dra. Slamet Mudjijah, SE.MM	KREATIVITAS BISNIS DALAM HOME INDUSTRY MINYAK KELAPA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi kasus di Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo)	75
10	Sudiyatno Yudi N. SE, Mhum, Puspita Rani, SE, Arief Wibowo, M.Kom, Dra. S.P.Sunardiyaningsih, MM	PENGUNAAN INTERNET UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PENGAYAAN BAHAN BELAJAR (STUDI KASUS E-LEARNING MAHASISWA UNIVERSITAS & ASTRI BUDI LUHUR, JAKARTA TAHUN 2009)	76
11	Purwo Adi Wibowo (STIENU Jepara) dan John Suprihanto (Pascasarjana FEB UGM Yogyakarta)	PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK, KEPERIBADIAN PROAKTIF, DAN KEAMPUHAN DIRI TERHADAP PERILAKU INOVASI PEGAWAI NEGERI SIPIL	78

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
12	Sulistya Rini Pratiwi, Evi Gravitiyani	PENANAMAN VEGETASI SEBAGAI UPAYA MEREDUKSI POLUSI UDARA (Pb) DI KOTA YOGYAKARTA	79
13	Winarto	URGENSI IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENYOKONG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA	80
14	Reni Hariyani, SE, M.Akt	PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP TOTAL RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT OLEH KAP BIG 4 DAN KAP NON BIG 4	81
15	Tri Munanto, Arief Wibowo	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL	82
16	Sri Rahayu	PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI PENCETAK SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEMBANGUN BUDAYA KREATIF	84
17	Dewi Kusuma Wardani, Sri Hermuningsih	Faktor Penentu Niat Bertransaksi Melalui Jejaring Sosial di Internet Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM)	86
18	Sri Harini, Dwi Gemina	PENGEMBANGAN BUDAYA KREATIF MAHASISWA MELALUI KULIAH KEWIRAUSAHAAN	87
19	I Tunjung Sulaksono	ANALISA PERSEPSI DAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK - PRODUK HERO SAVE PADA PT. HERO SUPERMARKET.TBK	88
20	Prof. Soenarto, M.A. M.Sc. Ph.D., Prof. Dr. Rahmawati, M.Si. Ak, Dra. S. Nurlaela, SE, M.Si., Ak., Celviana Winidyaningrum, SE, M.Si	ENTREPRENEURSHIP TRAINING MODEL FOR IMPROVING PERFORMANCE OF BATIK BAMBOO HANDYCRAFT IN KLATEN DISTRICT, CENTRAL JAVA	90
21	Widyat Nurcahyo dan Prabowo Pudjo Widodo	SISTEM PENDUKUNG BERPIKIR KREATIF DALAM PROSES PERANCANGAN PRODUK	92
22	Setyani Dwi Lestari, ME, Dr. Setyo Hari Wijanto, Ir, SE, MM, Dr.	PENGGUNAAN STRUCTURAL EQUATION MODEL DALAM MENGANALISIS PENGARUH STRATEGI-STRATEGI MANAJEMEN RANTAI PASOKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN	93
23	Budiman Arief, S.Kom, MM, Ir. Ady Widjaja M.Sc, MM	PENGARUH DISIPLIN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA RS. HARAPAN BUNDA	93

**DAFTAR ISI PROSIDING
SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SENMI) 2010
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA, 5 AGUSTUS 2010**

PANEL: SOSIAL/HUMANIORA

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
1	Agung Setiyo Wibowo	ANALISIS POTENSI DAN MASALAH KERANGKA ACUAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) DALAM UPAYA PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM DI ASIA TENGGARA	94
2	Iis Torisa Utami, SE, MM	MEMBANGUN SISTEM KEARSIPAN YANG MENUNJANG KEGIATAN PERKANTORAN BERBASIS ICT	95
3	Bambang Pujiyono, MM, M.Si	KEBIJAKAN LAYANAN TARIF PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR)	96
4	BRA. Baskoro S.Hum, M.Si.	PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF PARIWISATA DI DATARAN TINGGI DIENG SEBAGAI BASIS EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH	97
5	Bayu Vita Indah Yanti dan Baden Mucharam	KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA BANGKAU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKELANJUTAN	98
6	Devie Cynthiawati	TRANSFORMATION OF MEANING TOWARDS WORD OF MOUTH MESSAGE (A STUDY ON THE WORD OF MOUTH MESSAGES AMONG CUSTOMERS OF AYAM BAKAR MAS MONO IN TEBET & PEJATEN RESTAURANTS)	99
7	Diarsi Eka Yani	FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP PERAN KELOMPOK TANI DALAM PEMANFAATAN SARANA PRODUKSI USAHATANI BELIMBING	100
8	Didik Hariyadi R.	SYNTACTICAL ERRORS IN TRANSLATING BAHASA INDONESIAN TEXT INTO ENGLISH BY THE STUDENTS OF AKADEMI SEKRETARI BUDI LUHUR	101
9	Dina Novia Priminingtyas	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA SECARA MANDIRI	102
10	Ir.Ila Fadila M.Kes	PERBAIKAN GIZI BALITA MELALUI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PANGAN LOKAL (STUDI KASUS BALITA KABUPATEN SERANG)	103
11	Dr. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum, Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum	KONKRETISASI BUDAYA BANGSA MELALUI MEDIASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA	105
12	Nurul Huda	KINERJA PENYULUH PERTANIAN LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA	107

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
13	Nurul Huda	TINGKAT KOMPETENSI PROFESIONAL PENYULUH PERTANIAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI TERBUKA DAN JARAK JAUH (PTTJJ) UNIVERSITAS TERBUKA	108
14	Raka Wisnu Wardana	AUDIENCE RESPONSE OF INTERNET ADVERTISING	109
15	Pepl Rospina Pertiwi	IDENTIFIKASI TERHADAP KARAKTERISTIK KEINOVATIFAN PETANI PENERIMA INOVASI PTT PADI	110
16	Rohani Jahja Widodo	THE ROLE OF UNIVERSITY IN IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES	111
17	Rosita Hardiyati, S.Sos	AMBIENT MEDIA SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF UNTUK MENYAMPAIKAN PESAN PADA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	112
18	Rusdiyanta, M.Si dan Emil Radhiansyah, M.Si	STRATEGI PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN: PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK	114
19	Trimurti Artama (trimurti@mail.ut.ac.id)	PEMANFAATAN TEPUNG IKAN LEMURU DAN TEPUNG UBI JALAR UNTUK CAMPURAN PRODUK FISH STICK RASA KARI SEBAGAI MAKANAN FUNGSIONAL LANSIA	115
20	Nawiroh Vera	MEDIA MASSA DAN KONSTRUKSI REALITAS (Studi Analisis wacana Kritis Pemberitaan mengenai Lumpur Panas- Sidoarjo di RCTI dan ANTV)	116
21	Vivi Indra Amelia Nasution	PERSOALAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA-PEMBANTU RUMAH TANGGA (PMI-PRT) DALAM TINJAUAN KEAMANAN MANUSIA	118
22	Hadiono	MAKNA SIMBOLIK TATO (Studi Fenomenologi Pengguna Tato di Jakarta)	120
23	Rusmulyadi	MUNDURNYA SRI MULYANI INDRAWATI DALAM WACANA MEDIA MASSA	121
24	Rinda Noviyanti	PENGARUH TUTORIAL ONLINE TERHADAP NILAI AKHIR MMPIS102 MASA REGISTRASI 2009.1 DAN MMPIS203 MASA REGISTRASI 2009.2	122
25	Argogalih dan Mesquita H. Prasetyo	ANALISIS PERKEMBANGAN PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA	123
26	Argogalih dan Vinny	ANALISIS PERKEMBANGAN JUDI MAYANTARA DI INDONESIA	124
27	Yohannes Yahya W. Ir, MM	ANALISA DAMPAK SISTEM PENGGUNAAN FACEBOOK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR)	125
28	Dharmesta	Peran industri kreatif kerajinan dalam pembangunan kembali Afganistan Bagaimana Indonesia dapat berperan di dalamnya	126

**DAFTAR ISI PROSIDING
SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SENMI) 2010
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA, 5 AGUSTUS 2010**

PANEL: ARSITEKTUR

No	Pemakalah	Judul Makalah	Hal.
1	Anggraeni Dyah S	ANALISA PENGARUH PENGKONDISIAN UDARA TERHADAP TEMPERATUR EFEKTIF DI GEDUNG BIRU UNIVERSITAS BUDI LUHUR	127
2	Naimatul Afa dan Prima Widia Wastuty	APLIKASI WEB SEBAGAI MEDIA KONSERVASI ARSITEKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA Studi Kasus: Arsitektur Kolonial Di Kalimantan Selatan	128
3	Dimiyati, ST., MT	STUDI RANCANGAN RUANG PEDAGANG INFORMAL PADA BANGUNAN RUKO DAN RUKAN	129
4	Budi Fathony	PERMUKIMAN SUKU MADURA DALAM PERANTAUAN Studi Kasus : Kawasan Pegunungan Buring Malang-Jawa Timur	131
5	Khilda Wildana Nur	PENATAAN SPASIAL PECINAN MAKASSAR UNTUK MEMPERKUAT IDENTITAS CITRA KAWASAN	132
6	Lalu Mulyadi, Agung Murti Nugroho, Irawan Setyabudi	TEKNOLOGI IKLIM PADA RUMAH TINGGAL KOLONIAL DI KOTA MALANG SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KENYAMANAN THERMAL BANGUNAN	133
7	Sr. Mazlan Mohd Tahir, Dr. Nangkula Utaberta, Ar. Mastor Surat	PENGKALAN NILAI MURNI DIDALAM BUDAYA MUSLIM MELALUI SENIBINA: PENERAPAN ELEMEN RUMAH BERPANGGUNG KEPADA PERUMAHAN TERES DI MALAYSIA	134
8	Nangkula Utaberta, Mazlan Mohd Tahir, Nur Akmal Goh@ Abdullah	DESKRIPSI TIPOLOGI, KLASIFIKASI DAN ANALISIS PERANCANGAN MASJID DI MALAYSIA	136
9	Nangkula Utaberta, Badiossadat Hassanpour	Reconstructing design studios of architecture as a bridge between academic and practice	137
10	Sri Kurniasih	PENGARUH PENGGUNAAN MATERIAL DAN REVERBERATION TIME (RT) TERHADAP TINGKAT KEBISINGAN SEBAGAI PENENTU KUALITAS RUANG AKUSTIK	138
11	Tri Endangsih	BAHAN BANGUNAN SEBAGAI KOMPONEN KONSTRUKSI BANGUNAN Ditinjau Dari Aspek Keamanan Bangunan dari Kebakaran	140
12	Nik Lukman Nik Ibrahim & Nangkula Utaberta	TYPOLOGY AND DAYLIGHTING STUDY	141
13	Putri Suryandari	KETIDAKSELARASAN PERUANGAN KEKUASAAN DIBIDANG PERMUKIMAN DAN FASILITAS KOTA	142

Kata Kunci : *status gizi balita, ketersediaan pangan lokal (pisang), kabupaten Serang.*

KONKRETISASI BUDAYA BANGSA MELALUI MEDIASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Dr. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum¹⁾
Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum²⁾

1), 2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung

Abstrak

Hukum dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, hukum harus berjalan secara dinamis agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan dalam menciptakan ketertiban, kedamaian dan keadilan dapat tercapai. Namun demikian, peran hukum yang semakin kompleks perlu didukung oleh kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Kesadaran dan budaya hukum masyarakat pada dasarnya tidak hanya tercermin dari pelaksanaan terhadap berbagai ketentuan yang diatur secara materiil oleh undang-undang, tetapi juga dapat terlihat dari cara dan keinginan setiap anggota masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik di masyarakat, secara formalistik (litigasi) telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan guna menciptakan kepastian hukum. Namun demikian, kekhasan dari penyelesaian konflik secara litigasi, masih memiliki dampak yang negatif, di mana melalui jalur formalistik, para pihak akan dihadapkan pada pembebanan biaya yang besar. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kultur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang menyebabkan putusan dari suatu penyelesaian sengketa menjadi bias. Bagi dunia peradilan pada khususnya, maraknya penyelesaian kasus melalui jalur litigasi, mengakibatkan sengketa/perkara yang ditangani oleh pengadilan menjadi lebih banyak, sehingga waktu penyelesaiannya relatif cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah maupun masyarakat, perlu mengembangkan suatu metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, yaitu melalui mediasi.

Mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan, khususnya Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian masyarakat. Secara ekonomis, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi relatif lebih murah dengan waktu yang singkat, bila dibandingkan jalur litigasi. Sedangkan bila dilihat dari aspek bisnis, dengan diberlakukannya pasar bebas dan meningkatnya jumlah sengketa dagang, maka diperlukan cara dan sistem penyelesaian yang cepat, efektif dan

efisien. Pemerintah telah mengakomodir mediasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA). Namun demikian, masih sedikit masyarakat yang mengetahui, mengenal dan memahami mediasi secara komprehensif, sehingga perlu adanya sosialisasi. Untuk itu, perlu adanya "political will" dari pemerintah dalam mengembangkan mediasi sebagai budaya bangsa, dalam kerangka pembangunan bangsa pada umumnya, dan pembangunan hukum pada khususnya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan alternatif yang baik dalam setiap penyelesaian sengketa, hal ini merupakan cerminan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sebagai bentuk konkretisasi dari asas kekeluargaan, yang menjadi asas fundamental dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep mediasi cukup relevan nilai-nilai pancasila tersebut, mengingat melalui penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan tercipta suatu keharmonisan dalam lingkup sosial masyarakat, karena hal yang ingin dicapai dalam setiap pelaksanaan mediasi adalah "win-win solution".

Kata Kunci: budaya bangsa, mediasi, pembangunan hukum

KONKRETISASI BUDAYA BANGSA MELALUI MEDIASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Abstrak

Oleh:

Dr. Lindawaty S. Sewu, S.H.,M.Hum¹
Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum

Hukum dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, hukum harus berjalan secara dinamis agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan dalam menciptakan ketertiban, kedamaian dan keadilan dapat tercapai. Namun demikian, peran hukum yang semakin kompleks perlu didukung oleh kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Kesadaran dan budaya hukum masyarakat pada dasarnya tidak hanya tercermin dari pelaksanaan terhadap berbagai ketentuan yang diatur secara materiil oleh undang-undang, tetapi juga dapat terlihat dari cara dan keinginan setiap anggota masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik di masyarakat, secara formalistik (litigasi) telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dalam pelaksanaannya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan guna menciptakan kepastian hukum. Namun demikian, kekhasan dari penyelesaian konflik secara litigasi, masih memiliki dampak yang negatif, di mana melalui jalur formalistik, para pihak akan dihadapkan pada pembebanan biaya yang besar, Kondisi ini diperburuk dengan adanya kultur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), yang menyebabkan putusan dari suatu penyelesaian sengketa menjadi bias. Bagi dunia peradilan pada khususnya, maraknya penyelesaian kasus melalui jalur litigasi, mengakibatkan sengketa/perkara yang ditangani oleh pengadilan menjadi lebih banyak, sehingga waktu penyelesaiannya relatif cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah maupun masyarakat, perlu mengembangkan suatu metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, yaitu melalui mediasi.

Mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan, khususnya Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian masyarakat. Secara ekonomis, penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi relatif lebih murah dengan waktu yang singkat, bila dibandingkan jalur litigasi. Sedangkan bila dilihat dari aspek bisnis, dengan diberlakukannya pasar bebas dan meningkatnya jumlah sengketa dagang, maka diperlukan cara dan sistem penyelesaian yang cepat, efektif dan efisien. Pemerintah telah mengakomodir mediasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA). Namun demikian, masih sedikit masyarakat yang mengetahui, mengenal dan memahami mediasi secara komprehensif, sehingga perlu adanya sosialisasi. Untuk itu, perlu adanya "*political will*" dari pemerintah dalam mengembangkan mediasi sebagai budaya bangsa, dalam kerangka pembangunan bangsa pada umumnya, dan pembangunan hukum pada khususnya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi merupakan alternatif yang baik dalam setiap penyelesaian sengketa, hal ini merupakan cerminan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sebagai bentuk konkretisasi dari asas kekeluargaan, yang menjadi asas fundamental dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep mediasi cukup relevan nilai-nilai pancasila tersebut, mengingat melalui penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan tercipta suatu keharmonisan dalam lingkup sosial masyarakat, karena hal yang ingin dicapai dalam setiap pelaksanaan mediasi adalah "*win-win solution*".

Kata Kunci: budaya bangsa, mediasi, pembangunan hukum

¹ Keduanya Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung

A. Pendahuluan

Manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari perbedaan pendapat, perselisihan, ataupun konflik. Merupakan hal yang wajar apabila dalam kehidupan bermasyarakat, dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa/situasi namun memiliki persepsi, kepentingan dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa atau peristiwa tersebut. Kondisi demikian menuntut adanya suatu penyelesaian yang baik dan bersifat komprehensif, agar setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu proses litigasi di dalam pengadilan dan proses melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan putusan yang belum mampu untuk mengakomodir kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, biaya yang mahal dan terdapat indikasi memicu permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan yang dipersengketakan dan para pihak yang terlibat, dihindari kelambatan yang diakibatkan masalah prosedural dan administratif, dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan serta tetap menjaga hubungan baik.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, menjadi alternatif yang banyak ditempuh oleh para pihak yang bersengketa akhir-akhir ini. mengingat pola pikir masyarakat yang telah berubah dengan menghendaki adanya efisiensi. Di samping itu, keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang sering membingungkan, tidak memberikan kepastian hukum dan sulit untuk diprediksi bahkan menimbulkan ketidakadilan, menjadi faktor fundamental berkembangnya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, khususnya mediasi. Mediasi yang berakar dari prinsip musyawarah mufakat merupakan konkretisasi budaya bangsa, yaitu Pancasila, yang kemudian termuat secara konstitusional dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis Bangsa Indonesia. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu tuntutan dalam perkembangan hukum nasional maupun internasional, dimana dengan berkembangnya arus globalisasi telah mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang sejalan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar bebas dan persaingan bebas.

Namun demikian, demi terciptanya pelaksanaan mediasi sesuai yang dicita-citakan masyarakat serta terwujudnya ketertiban hukum, dirasakan perlunya suatu perangkat hukum, meskipun pada dasarnya pemerintah telah mengakomodir mediasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun belum bersifat komprehensif dan masih terbatas pada proses mediasi di dalam Pengadilan.

B. Musyawarah Sebagai Budaya Bangsa dalam Kerangka Filosofis dan Yuridis

Penyelesaian sengketa dapat memuaskan para pihak hanya dapat ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat. Hal ini menjadi konsepsi dasar atas pelaksanaan mediasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Musyawarah untuk mufakat merupakan falsafah Bangsa Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam upaya menyelesaikan sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa tercermin dalam dasar Negara yaitu Pancasila. Pada sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang dasar 1945 dan sejumlah peraturan di bawahnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat saja bersifat universal, tetapi sebaliknya, juga bersifat kontekstual. Sila-sila Pancasila mempunyai sifat universal karena nilai-nilai yang terkandung pada masing-masing pasal juga diyakini sebagai sesuatu yang baik bagi kemanusiaan di seluruh Indonesia. Di lain pihak, sila-sila Pancasila sebagai kesatuan yang bulat

utuh merupakan ciri khas Bangsa Indonesia.²Dalam kehidupan Bangsa Indonesia diakui, bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio-budaya Bangsa Indonesia. Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan member watak (jati diri) bangsa, sehingga wajar apabila kedudukan Pancasila diakui sebagai filsafat (pandangan hidup) bangsa.³

Nilai musyawarah mufakat inilah yang menjadi dasar dalam mencari solusi bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar Pengadilan. Masyarakat adat yang masih eksis di Indonesia misalnya masyarakat Kampung Naga, apabila menghadapi persengketaan para warganya hingga saat ini masih mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Nilai musyawarah mufakat ini terdapat dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Saat ini mediasi di Indonesia sudah sangat berkembang, khususnya di bidang keperdataan. Banyak bidang keperdataan yang menyelesaikan konfliknya melalui proses mediasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aturan tentang mediasi dalam bidang eperdataan, seperti Mediasi Perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005, Pertanahan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, Perburuhan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, dan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

C. Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Mediasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan artinya mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa sebelum sengketa diteruskan ke Pengadilan. Sedangkan proses mediasi di Pengadilan artinya mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan sengketa dan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa setelah sengketa masuk dalam proses pengadilan.

Pengertian Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

“ cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.”

Sedangkan **Christopher W. Moore**, menyatakan bahwa mediasi adalah:⁴

“ *the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power but who assists the involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in disputes.*”

Pelaksanaan mediasi di dalam Pengadilan, pada dasarnya telah diakomodir dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali perkara niaga, peradilan hubungan

² Darji Darmodihardjo. *Menatap Indonesia (Sebuah Antologi Filsafat Hukum dalam Bingkai Negara Pancasila)*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2010, hlm 3.

³ *Idem*

⁴ Christopher W. Moore. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. California: Jossey Bass Inc, 1986.

industrial, keberatan atas putusan BPSK dan KPPU, di mana mediasi sebagaimana dimaksud diwajibkan pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak.

Mediasi dilaksanakan melalui suatu perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut adalah “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dapat dikatakan seorang mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Melalui mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Christopher W Moore menyebutkan beberapa keuntungan yang diperoleh dari hasil mediasi yaitu keputusan yang hemat, penyelesaian secara cepat, hasil yang memuaskan bagi semua pihak, kesepakatan-kesepakatan yang komprehensif dan *customized*, praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang dapat diduga, pemberdayaan individu, melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan, kesepakatan yang lebih baik ketimbang hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah, dan keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.⁵

Garry Goodpaster menegaskan pula bahwa proses penyelesaian melalui mediasi juga dinilai sangat efektif bagi sengketa-sengketa yang melibatkan masyarakat, misalnya sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen dan sebagainya. Sebab dengan menggunakan tenaga mediator, masyarakat tidak perlu beramai-ramai ke pengadilan atau masing-masing dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun prosedur mediasi dikelompokkan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:⁶

1. Tahap pertama: menciptakan forum.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat gabungan.
- b. Pernyataan pembukaan oleh mediator, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
 - 1) mendidik para pihak;
 - 2) menentukan pokok-pokok aturan main;
 - 3) membina hubungan dan kepercayaan.
- c. Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah:
 - 1) dengar pendapat (*hearing*);
 - 2) menyampaikan dan klarifikasi informasi;
 - 3) cara-cara interaksi.

2. Tahap kedua: mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat terpisah yang bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan informasi selanjutnya;
- b. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak ;
- c. Membantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya ;
- d. Mendidik para pihak tentang cara tawar menawar penyelesaian masalah.

3. Tahap ketiga: pemecahan masalah.

Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediator mengadakan rapat bersama atau lanjutan rapat terpisah, dengan tujuan untuk:

- a. Menetapkan agenda.
- b. Kegiatan pemecahan masalah.

⁵ Bandingkan pula kelemahan-kelemahan melalui mediasi diantaranya adalah dapat memakan waktu yang lama, mekanisme eksekusi yang sulit, sangat tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa, mediasi tidak akan membawa hasil yang baik terutama jika informasi dan kewenangan tidak diberikan cukup kepadanya, dan jika pengacara/lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator sehingga putusannya menjadi bias.

⁶ Gary Goodpaster. *Negotiating and Mediating*. Jakarta: Elips Project, 1993, hlm. 247.

- c. Memfasilitasi kerja sama.
 - d. Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
 - e. Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.
 - f. Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
 - g. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.
4. Tahap keempat: pengambilan keputusan.
 Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
- a. Rapat-rapat bersama.
 - b. Melokalisasikan pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah.
 - c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.
 - d. Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.
 - e. Membantu para pihak untuk memperbandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak.
 - f. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah.
 - g. Mengusahakan formula pemecahan masalah berdasarkan “*win-win solution*” dan tidak ada satu pihakpun yang merasa kehilangan muka.
 - h. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.
 - i. Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

D. Pembangunan Hukum yang Sesuai dengan Budaya Bangsa

Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan berbagai aspek kehidupan ke arah yang lebih baik. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan perubahan mendasar yang terjadi di dalam masyarakat, akibat ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi). Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah keberlakuan aturan-aturan hukum yang ada, di mana aturan hukum yang belum mengakomodir perubahan dalam masyarakat, harus mampu berperan sebagai pedoman di kemudian hari, sehingga segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Konsep Negara Hukum yang telah dianut oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Konsep Negara Hukum tersebut membawa suatu konsekuensi bahwa segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus didasarkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Teori Rekayasa Sosial “*law as a tool of social engineering*” dari **Roscoe Pound** merupakan teori dasar yang harus dipahami dalam suatu Negara yang menganut konsep Negara hukum, seperti halnya Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa “hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat”⁷ hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan, bahwa pada kenyataannya sistem hukum Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, antara lain faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.

Pengaruh tersebut tidak saja dapat menimbulkan dampak positif tetapi juga negatif. Oleh karena itu, hukum akan lebih memenuhi harapan masyarakat jika faktor-faktor di atas dapat disinergikan, dengan demikian akan timbul dampak positif terhadap perkembangan hukum itu sendiri dan selanjutnya penegakan hukumnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan sengketa, dalam hal ini sengketa perdata baik di dalam dan di luar pengadilan itu sebenarnya bertujuan untuk mencari penyelesaian sengketanya secara adil, agar dapat mendapatkan penyelesaian sengketa secara tuntas dan mengikat keduanya. Namun demikian, karena keadilan itu bersifat subyektif, maka muncul kesulitan untuk mencari tolak ukurnya, karena adil itu bersifat relatif.⁸

⁷ Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006, hlm 13-14

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm 17

Keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana sosial *engineering*, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan, atau sebagai serba pendistribusian keadilan.⁹

Berdasarkan gambaran di atas, maka pembangunan hukum yang baik harus sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa sehingga mampu merubah pola perilaku masyarakat, sehingga dapat terciptanya ketertiban dan keamanan, mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas dan berperan sebagai pengontrol sosial.

E. Kesimpulan

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan wujud konkretisasi budaya bangsa, di mana dalam penyelesaian melalui jalur mediasi para pihak yang bersengketa menempuh upaya musyawarah mufakat guna menghindari adanya konflik yang berkelanjutan. Mediasi merupakan konsep penyelesaian sengketa yang mengakomodir nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam falsafah bangsa dan diyakini sebagai pedoman di dalam berinteraksi dalam masyarakat.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa patut untuk disosialisasikan agar masyarakat mendapatkan pembelajaran dalam memahami nilai-nilai budaya bangsa agar tidak tereduksi dengan akulturasi budaya luar yang dapat mengikis budaya bangsa. Penyelesaian melalui mediasi pada prinsipnya membuat para pihak lebih memahami cara penyelesaian yang telah mengakar dalam budaya bangsa yaitu musyawarah mufakat ketimbang cara berlitigasi di pengadilan yang merupakan budaya dari bangsa lain.

Musyawarah sebagai konsep dasar mediasi memiliki tujuan yang baik, yaitu agar hubungan baik pihak yang bersengketa dapat berkesinambungan dan menghindari adanya tindakan kekerasan. Namun demikian pada praktiknya, perlu adanya aturan hukum yang melandasi kegiatan mediasi, hal ini dimaksudkan agar dalam proses pra-mediasi hingga pasca mediasi dapat tercipta suatu kondisi yang tertib sesuai dengan cita-cita pembangunan hukum Indonesia.

⁹ Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: C.V. Utomo, 2006, hlm 226-227

Daftar Pustaka

A. Buku

Darji Darmodiharjo. *Menatap Indonesia (Sebuah atologi filsafat Hukum dalam Bingkai Negara Pancasila)*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2010.

_____ dan Sidharta. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Eka Darmaputera. *Pancasila: Identitas dan Modernitas (Tinjauan Etis dan Budaya)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.

Gary Goodpaster. *Negotiating and Mediating*. Jakarta: Elips Project, 1993.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: C.V. Utomo, 2006.

Stephen Kozicki. *Creative Negotiating*. Holbrook Massahussets: Adams Media Corporation, 1998.

Yoshiro Kusano. *Wakai (Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa)*. Jakarta: Grafindo, 2008

B. Makalah

Humphrey R. Djemat. *Mediasi Dalam Sengketa Keperdataan*. Bandung: Disajikan dalam Seminar Mediasi Pada Universitas Kristen Maranatha, 2010.

Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Disajikan dalam Seminar Mediasi Pada Universitas Kristen Maranatha, 2010.

Ruang: 7.3.8 (Ged. Unit 7, Lantai 3, Ruang ke-8)
Panel: Sosial/Humaniora

No	Waktu	Nama	Judul Makalah
1	13.00-13.20	Dr. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum, Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum	KONKRETISASI BUDAYA BANGSA MELALUI MEDIASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
2	13.20-13.40	Nurul Huda	KINERJA PENYULUH PERTANIAN LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA
3	13.40-14.00	Nurul Huda	TINGKAT KOMPETENSI PROFESIONAL PENYULUH PERTANIAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI TERBUKA DAN JARAK JAUH (PTJ) UNIVERSITAS TERBUKA
4	14.00-14.20	Raka Wisnu Wardana	AUDIENCE RESPONSE OF INTERNET ADVERTISING
5	14.20-14.40	Argogalih dan Mesquita H. Prasetyo	ANALISIS PERKEMBANGAN PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA
6	14.40-15.00	Argogalih dan Vinny	ANALISIS PERKEMBANGAN JUDI MAYANTARA DI INDONESIA
7	15.00-15.20	Yohannes Yahya W. Ir, MIM	ANALISA DAMPAK SISTEM PENGGUNAAN FACEBOOK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR)
8	15.20-15.40	Dharmesta	Peran industri kreatif kerajinan dalam pembangunan kembali Afghanistan Bagaimana Indonesia dapat berperan di dalamnya

ISSN 2087-0930



9 772087 093077

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Jl. Cileduk Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan

Jakarta Selatan 12260

Telp.:(021) 5853753 (Hunting)

<http://www.budiluhur.ac.id>

